

Book Review

**Lembaran
Sejarah**

Volume 15 Number 1
April 2019

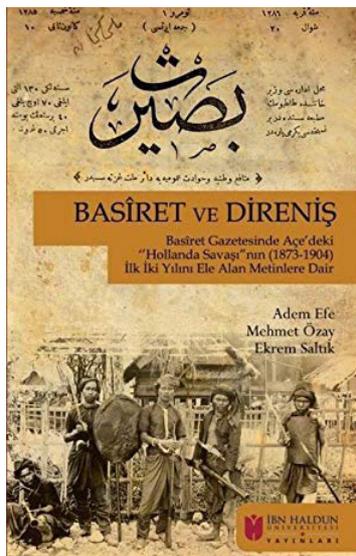
ISSN 2314-1234 (Print)
ISSN 2620-5882 (Online)

Page
91—99

Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo

FRIAL RAMADHAN SUPRATMAN

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Email: frialramadhan1@gmail.com



Title:

Bairet ve Direniş: Basiret Gazetesinde Açe'deki "Hollanda Savaşı"nın (1873-1904) İlk İki Yılına Ele Alan Metinlere Dair

Author:

Adem Efe, Mehmet Özay, Ekrem Saltık

Publisher:

İbn Haldun Üniversitesi Yayınları (2018)

Pages:

152

ISBN:

978-605-67533-0-5

Setelah Aceh diterpa bencana badai Tsunami pada 2004, banyak mata dan media internasional kembali melihat daerah ini sebagai bagian dari sejarah panjang Samudera Hindia. Sebelumnya sejarah Aceh hanya dipandang dalam perspektif lokal dan provinsional saja. Namun, jika kita melihat sejarah yang panjang, khususnya sejak abad ke-13, setelah Islam dianut oleh para penguasa Sumatra, Aceh memainkan peran yang signifikan secara global. Peran ekonomi tentu saja menjadi faktor yang utama dalam melihat peran Aceh di dalam Samudera Hindia. Posisi Aceh semakin kuat, terutama sejak kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Dalam konteks ini Kesultanan Aceh tumbuh besar, terutama ketika diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahar (1537-1568), dan mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).¹ Melalui perdagangan di pelabuhan Banda Aceh, Kesultanan Aceh mampu menjadi kekuatan ekonomi yang besar di Samudera Hindia. Sebagai salah satu pelabuhan paling ramai pada abad ke-16, Banda Aceh selalu ramai dengan bermacam-macam pedagang, baik pedagang Arab, Persia, India, Cina hingga Eropa. Lada menjadi andalan utama dari perdagangan di Pelabuhan Banda Aceh. Selain itu ada juga

1) Ali Hasjmy, *Iskandar Muda Meukuta Alam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 44.

kapur barus, kayu manis, rempah-rempah hingga gajah yang siap ditukar dengan produk luar, seperti tekstil, proselen, karpet, sutra hingga kuda.² Bahkan hingga abad ke-19, Aceh tetap menjadi salah satu dari tiga penghasil lada terbesar di dunia. Posisi ini menjadikan Aceh sangatlah penting dalam diplomasi internasional yang ketika itu didominasi oleh Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan juga Usmani (*Ottoman*).

Memasuki “Abad ke-19 yang panjang,” dunia mengalami dinamika yang berbeda dari sebelumnya. Kebangkitan Kekuatan Besar (*Great Powers*), seperti Inggris, Prancis, Rusia dan Jerman telah memunculkan kekuatan baru dalam Tatanan Dunia Baru (*New World Order*). Penguasa-penguasa lama, seperti Usmani dan Hapsburg, mau tidak mau harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Usmani, misalnya, mengeluarkan deklarasi Gülhane pada 1839 untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Eropa, khususnya Inggris dan Prancis, dalam menghadapi Rusia. Deklarasi tersebut menetapkan jika Usmani akan memandang warga Muslim dan non-Muslim di dalam negaranya dengan setara.³ Perubahan tatanan dunia ini juga dirasakan oleh Kesultanan Aceh. Pada awalnya, kolonialisme Belanda di Indonesia dan Inggris di Malaysia tidak mengusik Kesultanan Aceh sama sekali. Pada 1824, berdasarkan Traktat London, Inggris menguasai bagian utara Selat Malaka (Malaysia sekarang) dan Belanda menguasai selat Malaka bagian Selatan (Indonesia sekarang). Posisi Aceh berada di dalam arena kontestasi dua negara ini. Untuk itu diputuskan bahwa Kesultanan Aceh tetap netral dibawah perlindungan Kerajaan Inggris. Namun, pada 2 November 1871, Belanda melanggar Traktat London dengan memasukan Kesultanan Aceh sebagai bagian dari wilayah koloninya (hlm 33). Sejak saat itu, Belanda mulai melakukan persiapan invasi ke Aceh.

Buku yang akan dibahas di sini merupakan tulisan dari tiga akademisi asal Turki, yaitu Adem Efe, Mehmet Özey dan Ekrem Saltık, yang tertarik untuk membahas sejarah Asia melalui kacamata agama, sosiologi, dan antropologi. Dengan demikian, topik “Perang Belanda di Aceh” atau “Perang Aceh” sangatlah menarik untuk dibahas karena perang ini dapat dikatakan sebagai “perang total” yang menentukan hidup-mati Kesultanan Aceh yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Selain itu, Perang Aceh (1873-1904) juga memiliki arti penting bagi Republik Turki itu sendiri karena perang ini menjadi tonggak hubungan diplomatik Indonesia-Turki yang hampir terlupakan. Kesultanan Aceh sudah membuka hubungan diplomasi dengan Usmani sejak abad ke-16, bahkan Kesultanan Aceh sendiri, meskipun masih diperdebatkan oleh para sejarawan, mengklaim telah menjadi bagian dari

2) Untuk perdagangan di Aceh pada periode modern awal, lihat: Arun Kumar Das Gupta, “Acheh in Indonesian Trade and Politics,” (Disertasi tidak diterbitkan di Universitas Cornell, 1962), hlm 99.

3) Halil İnalçık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu” dalam *Beletten*, vol.28, No.112, (1964), hlm 613.

wilayah Usmani.⁴ Namun, munculnya Iskandar Muda sebagai sultan Aceh telah berhasil sedikit demi sedikit melepaskan ketergantungan Aceh atas Usmani. Abad ke-19, hubungan Usmani-Aceh mulai terjalin kembali berkat adanya invasi kolonial Belanda yang puncaknya terjadi saat Perang Aceh.

Perang Aceh merupakan bagian dari narasi besar sejarah nasional Indonesia yang sudah banyak digali dan ditulis oleh para sejarawan. Dalam narasi sejarah Indonesia, perang ini disejajarkan dengan Perang Jawa (1825-1830) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Para aktor asal Aceh yang terlibat dalam perang ini pun sudah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, seperti Panglima Polem, Teuku Umar hingga Cut Nyak Dien. Dengan demikian Perang Aceh sudah meneguhkan posisinya sebagai studi kasus yang nyata dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Setidaknya, sudah banyak sejarawan yang membahas perang ini. Ibrahim Alfian merupakan salah satu sejarawan asal Indonesia yang menerbitkan karya akademis mengenai perang ini. Dalam karyanya, Alfian (1987) menekankan bagaimana aspek sosial dan kultural masyarakat Aceh mempengaruhi jalannya perang. Tentu saja Islam merupakan faktor penting yang mendorong adanya Perang Aceh karena bagi masyarakat Aceh, perjuangan melawan Belanda adalah bagian dari 'Perang Suci'. Bahkan semangat perang suci ini sudah ada sejak Portugis datang ke Aceh.⁵ Hal ini juga dibuktikan melalui manuskrip *Hikayat Perang Sabil*. Selain itu, sejarawan asal Australia, Anthony Reid (1969), juga sudah menulis Perang Aceh melalui pendekatan sejarah diplomasi. Dengan menggunakan arsip luar negeri, seperti Inggris dan Belanda, Reid melihat Perang Aceh diwarnai oleh kepentingan-kepentingan internasional.⁶ Dengan demikian, Reid tidak hanya melihat perang ini sebagai perang suci, tetapi juga perang yang juga diwarnai oleh kepentingan politik pragmatis yang kuat.

Buku yang ditulis oleh Adem Efe, Mehmet Özay dan Ekrem Saltık nampaknya ingin mempertanyakan ruang lingkup Perang Aceh (1873-1904) itu sendiri. Mereka menyayangkan bahwa kajian terhadap Perang Aceh lebih banyak dilihat dalam perspektif regional. Pembahasan sebab dan akibat Perang Aceh lebih banyak ditekankan pada konteks Pulau Sumatra dan Selat Malaka saja, padahal Perang Aceh memiliki konteks yang lebih luas daripada itu. Karena Kesultanan Aceh merupakan salah satu kesultanan Muslim terbesar di Asia Tenggara dan Samudera Hindia, maka posisi Aceh juga tidak dapat dibatasi hanya Pulau Sumatra dan Selat Malaka. Ketika terjadi invasi Belanda

4) İsmail Hakkı Kadi, A.C.S. Peacock, & Annabel Teh Gallop (ed), "Writing History the Acehese embassy to Istanbul, 1844-1852," dalam R. Michael Feener, Patrick Daly & Anthony Reid (ed), *Mapping the Acehese Past* (Liedien: KITLV Press, 2011), hlm 167.

5) Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 109.

6) Anthony Reid, *The Contest of North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898* (Kuala Lumpur: University of Malaya and Oxford University Press, 1969), hlm 84.

terhadap Aceh, maka reaksi yang muncul tidak hanya berasal dari para sultan di dunia Melayu saja, tetapi mengundang reaksi dari publik di Negara Usmani. Dalam buku ini ketiga penulis menyatakan bahwa Perang Aceh tidak hanya mengundang reaksi dari penguasa dan publik di Pulau Sumatra dan Selat Malaka, tetapi juga dari publik secara global (hlm 135). Dengan demikian gagasan utama dalam buku ini adalah bahwa para penulis ingin menunjukkan bahwa Perang Aceh tidak hanya mengundang reaksi regional saja, tetapi juga memiliki dampak lebih luas secara global. Dalam konteks buku ini, para penulis menunjukkan bagaimana reaksi salah satu surat kabar Usmani, *Basiret*, terhadap Perang Aceh.

Untuk menjawab tesis yang diajukan dalam buku ini, para penulis nampaknya tidak menggunakan pendekatan teoritis tertentu. Malahan, para penulis lebih menekankan kekuatan sumber primer yang tidak pernah digunakan oleh para sejarawan Indonesia, yaitu surat kabar Usmani. Dalam buku ini para penulis mencoba memaparkan Perang Aceh dalam perspektif dan sumber baru. Mereka menulis perang ini dari perspektif Usmani. Dalam buku ini mereka membahas bagaimana Perang Aceh diberitakan dan ditulis di dalam surat kabar *Basiret* yang terbit di Istanbul dan Kairo. Tentu saja ini adalah hal yang sangat menarik karena para sejarawan Indonesia, jika menulis periode kolonialisme Belanda, lebih fokus menggali sumber-sumber berbahasa Belanda. Hal ini menjadi kekuarangan bagi sejarawan Indonesia itu sendiri. Selain akan mempersulit penulisan sejarah yang Indonesiasentris, hal ini juga akan “melokalkan” sejarah Indonesia sehingga akan membuat sejarah Indonesia itu sendiri terisolasi dari sejarah global. Ketiga penulis ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan perspektif baru dalam penulisan sejarah Indonesia. *Basiret* dipilih sebagai surat kabar yang memberitakan Aceh karena warna ideologi surat kabar sangat simpatik terhadap dunia Islam (*Alem-i Islam*), seperti Aceh, sehingga surat kabar inilah diantaranya yang lengkap memberitakan Perang Aceh. Para penulis buku ini mendapatkan surat kabar yang terbit sejak 1871 ini di beberapa perpustakaan yang ada di Istanbul, diantaranya Perpustakaan Negara Beyazit (*Beyazit Devlet Kütüphanesi*) dan Perpustakaan Kepustakaan Atatürk (*Atatürk Kitaphı Kütüphanesi*). Meskipun demikian, *Basiret* tidak merekam seluruh kejadian dalam Perang Aceh yang terjadi sejak 1871 hingga 1904. Penulis hanya membahas *Basiret* dalam tiga tahun pertama terjadinya perang, yaitu dari 1873 hingga 1876.

Untuk memahami buku ini tentunya penulis terlebih dahulu menjelaskan kepada para pembaca mengenai sejarah surat kabar *Basiret* yang didirikan di Istanbul. *Basiret* merupakan surat kabar yang didirikan oleh seorang Usmani (*Osmanlı*) yang bernama Ali Efendi pada 1870. Surat kabar yang terbit antara 1870-1908 ini ternyata mendapatkan dukungan dan sokongan dari pemerintah pada masa awal pendiriannya. Selain itu, karena

banyak memberitakan mengenai perang yang dilakukan oleh Jerman, maka *Basiret* juga mendapatkan bantuan dari Jerman. Tentu saja langkah *Basiret* ini tepat karena pada akhir abad ke-19, Usmani mulai berkoalisi dengan Jerman sehingga surat kabar ini menjadi organ penting yang menjembatani hubungan Usmani-Jerman. Surat kabar ini juga banyak mengabarkan berita mengenai provinsi Usmani, Mesir, yang diperintah secara otonom oleh Khedive Ismail sehingga *Basiret* diizinkan untuk membuka kantor di Kairo (hal 9). Dengan demikian *Basiret* memiliki kantor di dua kota, yaitu Istanbul dan Kairo. Peran *Basiret* semakin penting ketika Sultan Abdulhamid II (1876-1909) naik takhta. Sultan yang bergelar *Amirul Mukminin* ini terkenal dengan usahanya dalam menebarkan semangat Pan-Islamisme ke dunia Islam, terutama yang berada di bawah koloni negara-negara Eropa, seperti Hindia Belanda dan British Malaya. Sehingga, pada masa Abdulhamid II, *Basiret* menjadi organ penting dalam menebarkan semangat Pan-Islamisme dengan memberitakan kondisi Muslim yang berada di bawah jajahan Eropa.⁷

Para penulis memperlihatkan bagaimana *Basiret* mengabarkan Perang Aceh dengan perspektif Pan-Islamisme. Artinya *Basiret* ingin memperlihatkan bahwa Aceh merupakan negara Muslim yang perlu dilindungi oleh Usmani. Bahkan pada 27 Mei 1873, *Basiret* mengabarkan bahwa orang-orang Aceh merupakan warga negara Usmani. Menurut *Basiret*: “Sejak 670 tahun yang lalu, orang-orang Aceh merupakan warga negara (*tebaa*) dari *Devlet-i Aliyye* (julukan untuk Usmani)”. Kemudian *Basiret* menyatakan bukti bahwa orang-orang Aceh merupakan warga Usmani adalah karena mereka (Kesultanan Aceh) menggunakan bendera berlambang Bulan Bintang (hlm 42-44). *Basiret* juga menekankan bahwa agar Usmani tidak hanya membatasi kerja samanya dengan kesultanan-kesultanan Muslim di Asia Tengah saja, tetapi juga harus memperhatikan Kesultanan Aceh yang sudah memiliki hubungan erat dengan Usmani sejak abad ke-16 (hlm 43). Dengan demikian, *Basiret* ingin agar Usmani mau menolong Aceh dari invasi Belanda karena: 1) Aceh merupakan kesultanan Islam, 2) orang-orang Aceh merupakan bagian dari warga negara Usmani. Hal yang menarik di sini adalah bahwa *Basiret* membicarakan konsep warga negara. Sejak era Sultan Mahmud II, Usmani sudah mulai melakukan modernisasi dalam bidang pemerintahan, khususnya dalam pencatatan penduduk sehingga Usmani memiliki paspor untuk menandai warga negaranya. Namun, tentu saja konsep dan klaim kewarganegaraan Usmani masih terus diperdebatkan. Banyak orang-orang yang mengaku menjadi warga Usmani. Pada akhir abad ke-19, Arab Hadrami yang tinggal di Indonesia pun mengklaim sebagai warga Usmani sehingga mereka tidak mau jika statusnya disamakan dengan orang Tionghoa sebagai masyarakat Timur Jauh (*Vreemde Oosterlingen*).

7) Kemal Karpat, *The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State* (New York: Oxford University Press, 2001), hlm 125.

Basiret juga mengabarkan tiga tahun pertama Perang Aceh dengan cukup detail. Surat kabar ini memberitakan perang sejak dimulai dari pendaratan pasukan Belanda di Aceh pada 26 Maret 1873. Dalam pendaratan ini, *Basiret* menyatakan bahwa Aceh berhasil memukul mundur Belanda di pantai Ulee Lhee (hlm 54). Setelah pemberitaan ini, *Basiret* menerbitkan artikel berita yang menunjukkan bahwa Usmani melakukan protes terhadap invasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Aceh. Kemudian *Basiret* juga mengabarkan bagaimana Belanda melakukan serangan terhadap keraton Kesultanan Aceh. Atas hal ini *Basiret* semakin memperdalam berita mengenai Kesultanan Aceh. Untuk itu *Basiret* mengangkat kembali berita mengenai hubungan Aceh-Usmani yang sudah terjalin sejak lama, yakni sejak masa pemerintahan Sultan Selim I (1512-1520). Tentu saja ini dilakukan agar Usmani segera mengambil langkah untuk menolong Aceh dalam menghadapi Belanda. Namun, ternyata Usmani belum juga mengambil tindakan politik dan militer atas invasi Belanda ke Aceh. Jika kita melihat sejarah Usmani akhir, kita akan mengetahui bahwa invasi Belanda ke Aceh terjadi ketika Usmani sedang menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, khususnya Inggris dan Prancis. Hal ini disebabkan adanya kepentingan Usmani agar Barat mau melindungi dan membantunya ketika Rusia melakukan serangan terhadap wilayah Usmani. Dalam hal ini kita melihat bahwa Usmani sangat berhati-hati dalam mengambil langkah politik dan militer, khususnya kepada negara-negara Barat.

Singkatnya, dalam buku ini, kita mengetahui bahwa *Basiret* memberitakan Perang Aceh dalam tiga narasi. Pertama, *Basiret* memberitakan Perang Aceh secara kronologis dan detail, mulai dari pendaratan pasukan di Sumatra hingga penyerangan ke keraton kesultanan. *Basiret* juga memperlihatkan bagaimana usaha diplomasi dilakukan agar Aceh mau menyerah kepada Belanda. Kedua, *Basiret* memberitakan mengenai profil Aceh. Hal ini dilakukan agar publik di negara Usmani mengetahui dimana Aceh berada. Hal tersebut cukup wajar karena ketika Aceh hendak meminta bantuan militer kepada Usmani dalam menghadapi Belanda, maka Kesultanan Aceh menyelipkan peta Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa Usmani sendiri tidak memiliki informasi yang cukup mengenai Aceh. Ketiga, *Basiret* memberitakan hubungan Aceh-Usmani. Hal ini diperlukan agar para elite Usmani sadar bahwa Aceh merupakan bagian dari wilayah Usmani dan memiliki hubungan erat sejak abad ke-16.

Penulis telah menguraikan dengan detail bagaimana usaha-usaha *Basiret* dalam memberitakan dan mempropagandakan Perang Aceh ke pembaca di negara Usmani. Dengan demikian Usmani sadar bahwa Barat memiliki ambisi yang sangat besar untuk melakukan invasi. Pemberitaan mengenai Perang Aceh juga menjadi referensi bagi Usmani bahwa peradaban Barat yang dianggap lebih maju tetap diwarnai oleh adanya penjajahan dan rasisme.

Tentunya ini menjadi kritik yang keras untuk para elite Usmani pertengahan abad ke-19 yang sangat mengagumi peradaban Barat, seperti Perdana Menteri Usmani Ali Pasa dan Menteri Luar Negeri Usmani Fuad Pasa. Keduanya merupakan dua figur utama dalam membuka gerbang westernisasi Usmani. Berkat keduanya, budaya dan peradaban Barat banyak diadopsi dalam sistem politik, sosial dan kebudayaan Usmani. Nantinya usaha Ali Pasa dan Fuad Pasa mendapat kritik keras dari kelompok Usmani Muda yang menginginkan adanya sintesis antara Islam dan modernisasi.⁸ Buku ini akan lebih lengkap lagi jika penulis juga sedikit banyak melakukan perbandingan berita antara berita mengenai Perang Aceh dan berita mengenai Perang Filipina. Pada pertengahan abad ke-19, Perang Filipina juga menjadi isu yang sangat penting untuk dunia Islam karena orang-orang Moro yang beragama Islam menjadi penentu dari perebutan kekuasaan Amerika Serikat dan Spanyol di Filipina. Tentunya jika penulis membandingkan antara bagaimana *Basiret* memberitakan Perang Aceh dengan Perang Filipina, maka kita akan mengetahui wilayah Asia Tenggara mana yang lebih mendapatkan perhatian dari negara Usmani.

Buku ini nampaknya tidak bertujuan untuk memberikan teori baru mengenai Perang Aceh, namun, setidaknya, buku ini ingin memberikan perspektif dan pandangan baru terhadap publik mengenai Perang Aceh. Para penulis buku ini ingin menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh masih merupakan kekuatan yang besar pada abad ke-19. Perubahan politik dan ekonomi pada Kesultanan Aceh akan membawa dampak yang besar. Buku ini menunjukkan bahwa Perang Aceh telah mengundang reaksi keras dari surat kabar Usmani. Surat kabar *Basiret* ingin memberikan informasi mengenai Perang Aceh kepada sultan-sultan Usmani agar mereka tidak berdiam diri, tetapi dapat memberikan bantuan militer dan diplomasi untuk membantu Aceh dalam mengatasi serangan dan invasi Belanda.

Baik dalam konteks sejarah Aceh maupun Usmani, tentu saja, buku sangat penting untuk dibaca. Dalam konteks sejarah Aceh, buku ini telah memperkaya pandangan kita mengenai Perang Aceh. Meskipun Reid (1969) telah memaparkan karyanya dengan baik mengenai Perang Aceh, namun Reid sendiri masih belum menampilkan Perang Aceh lebih spesifik dari sumber non-Barat. Karya ini justru melengkapi karya Reid. Penggunaan surat kabar *Basiret* sebagai studi kasus dan sumber primer merupakan hal yang baru dan telah memperlihatkan secara spesifik bagaimana respon dari masyarakat non-Barat dan Muslim terhadap Perang Aceh. Negara Usmani tentu saja menjadi contoh penting karena negara ini merupakan negara Muslim terbesar pada saat itu, bahkan Sultan Abdulhamid II (1876-1909) juga menganggap dirinya sebagai *Amirul Mukminin* (Pemimpin Muslim) bersamaan dengan kebijakan

8) Şerif Mardin, *The Genesis of Young Ottoman Thought* (New York: Syracuse University Press, 2000), hlm 108-109.

Pan Islamisme yang dilakukannya selama bertakhta sebagai sultan Usmani. Ini tentu saja hal yang baru dalam konteks sejarah Aceh. Dalam konteks sejarah Usmani, hal ini sudah dikaji oleh beberapa sejarawan, seperti Cezmi Eraslan (1992) dan Azmi Ozcan (1997). Baik Eraslan maupun Ozcan sudah melakukan analisa yang baik mengenai respon Usmani terhadap imperialisme di wilayah-wilayah Muslim, seperti di India, British Malaya hingga Hindia Belanda. Namun tentu saja karya ini menunjukkan secara lebih spesifik terhadap satu Perang tertentu, yaitu Perang Aceh, dan oleh surat kabar tertentu, yaitu surat kabar *Basiret*.

Buku ini telah membawa sumbangan yang besar untuk memperkaya historiografi Indonesia. Buku ini telah memberikan perspektif baru bahwa Perang Aceh tidak hanya direspon dalam konteks Pulau Sumatra dan Selat Malaka saja, tetapi juga memiliki dampak global yang lebih luas. Dalam hal ini para penulis memaparkan bagaimana surat kabar Usmani, yang berkantor di Istanbul dan Kairo, justru merespon Perang Aceh dengan sangat vokal. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kesultanan Aceh hingga akhir abad ke-19 masih sangat penting dan dihormati oleh negara-negara non-Barat. Selain itu, dengan terbitnya buku ini, maka kita mengetahui bahwa sumber sejarah untuk penulisan sejarah Indonesia bukan hanya berada berupa arsip-arsip kolonial Belanda, tetapi juga dapat juga diambil di Istanbul. Sebagai negara yang bertahan lebih dari 600 tahun dengan luas wilayah yang mencakup Mediterania Timur, Balkan, Anatolia, Arab hingga Samudera Hindia, negara Usmani memiliki arsip dan dokumentasi sejarah yang kaya. Karya dari Adem Efe, Mehmet Özey dan Ekrem Saltık telah memberikan perspektif baru dari narasi sejarah Indonesia. Singkatnya, melalui karya dari para penulis, kita mengetahui bahwa Indonesia tidak terisolasi dari jalannya sejarah global.

Referensi

- Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Das Gupta, Arun Kumar, "Acheh in Indonesian Trade and Politics," (Disertasi tidak diterbitkan di Universitas Cornell, 1962).
- Eraslan, Cezmi, *II Abdülhamid ve İslam Birliği: Osmanlı Devleti'nin İslam Siyaseti 1856-1908* (İstanbul: Ötüken Neşriyet, 1992).
- Hasjmy, Ali, *Iskandar Muda Meukuta Alam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- İnalçik, Halil, "Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu" dalam *Beletten*, vol.28, No.112, (1964), hlm 603-622.
- Kadı, İsmail Hakkı, A.C.S. Peacock, & Annabel Teh Gallop (ed), "Writing History the Acehnese embassy to Istanbul, 18449-1852," dalam R.Michael Feener, Patrick Daly & Anthony Reid (ed), *Mapping the Acehnese Past* (Ledien: KITLV Press, 2011).
- Karpat, Kemal, *The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State* (New York: Oxford University Press, 2001).

- Mardin, Şerif, *The Genesis of Young Ottoman Thought* (New York: Syracuse University Press, 2000), hlm 108-109.
- Özcan, Azmi, *Pan-Islamism: Indian Muslim, the Ottomans and Britain 1877-1924* (Leiden: Brill, 1997).
- Reid, Anthony, *The Contest of North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898* (Kuala Lumpur: University of Malaya and Oxford University Press, 1969).